



RENJA

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2020

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
JL. ANTASARI NO. 4 PUTUSSIBAU TELP. (0567) 2020219

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam RKPD ini, baik dari aspek metode penulisan, substansi/isi serta aspek lainnya. Akan tetapi, kami berharap, penyelesaian RKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan langkah awal dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renja BPPD Kapuas Hulu dibuat dengan tujuan memberikan gambaran kepada semua pihak terhadap:

- a. Kerangka pikir lahir dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- b. Argumentasi yuridis dan teoritis Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- c. Gambaran Umum Kawasan Perbatasan;
- d. Gambaran Umum Sumber Daya BPPD Kab. Kapuas Hulu
- e. Kedudukan, Tugas, fungsi serta kewenangan yang dimiliki;
- f. Program dan Kegiatan BPPD Tahun 2020;

Dengan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2020 telah ditetapkan diharapkan muncul alat umpan balik (*Feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Semoga Rencana Kerja Di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2020 dapat digunakan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Putussibau, Juni 2019

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,

AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670805 199403 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika	4
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Badan Perbatasan Daerah Tahun Lalu	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun dan Capaian Renstra SKPD	5
	2.2 Capaian Kinerja Pelayanan SKPD	5
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan SKPD	7
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
Bab III	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16
	3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	16
	3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	20
	3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	20
	3.4 Tujuan Dan Sasaran	21
	3.5 Program dan Kegiatan	22
BAB IV	Penutup	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dalam Pasal dinyatakan, bahwa: RKPD Tahun 2019 memuat:

1. rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. prioritas pembangunan daerah; dan
3. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, RKPD harus berpijak pada kebijakan dan program Nasional. Sebagai satu acuan, kedudukan, peran dan fungsi RKPD strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa pertimbangan terhadap pentingnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja

Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai bagian dari Perangkat Kerja Daerah, dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berpedoman pada:

1. Arah kebijakan pembangunan nasional,
2. arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi

perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021

1.2 DASAR HUKUM.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana dipaparkan di atas merupakan amanah Undang-Undang dan wajib dibuat oleh setiap jenjang pemerintahan. Dasar Hukum terhadap Penyusunan Rencana Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2020, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011–2015;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 17. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertujuan untuk :

1. Mengetahui Alasan terhadap disusunnya RKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Memahami Kondisi wilayah Perbatasan serta dan Sumber Daya yang dimiliki
3. Memahami Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Uraian Tugas Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
4. Melakukan review terhadap RKPD Tahun 2019
5. Memahami Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan;

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

- Bab I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPD Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan BPPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan SKPD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
 - 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
 - 3.3 Program Dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN PENGELOLA BADAN PERBATASAN DAERAH

TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Badan Pengelola Badan Perbatasan Daerah tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi:

- a. Kemampuan SKPD dalam merealisasikan target kinerja.
- b. Sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
- c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Badan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya serta berpedoman pada uraian tugas pokok, fungsi organisasi pelayanan SKPD Kabupaten Kapuas Hulu. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada table berikut ini:

Analisis terhadap Kinerja Pelayanan Tahun 2019
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Capaian Kinerja	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya dukungan fasilitas guna aktifitas pelayanan yang baik	400 buah matrai	1.800.000	100%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	1 Tahun	37.200.000	100%	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	61.080.000	100%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	20.799.600	100%	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan	1 Tahun	5.000.0000	100%	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	39.309.900	100%	
	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	10.700.000	100%	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya efektifitas kinerja aparatur	1 Tahun	3.000.000	100%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan	1 Keg	58.000.000	100%	
	Penyediaan bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	3.000.000	100%	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	1 Tahun	46.500.000	100%	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	282.092.000	100%	
	Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	1 Tahun	36.050.000	100%	
	Penyusunan RKA dan DPA DKPD	Jumlah tersedia RKA,DPA,RKA perubahan dan DPA perubahan	1 Keg	6.316.500	100%	
	Penyediaan jasa pendukung kantor	Tersedianya jasa pendukung kantor	1 keg	39.000.000	100%	
02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD				
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional roda 4	Tersedianya kendaraan dinas operesional roda 4	1 Unit	365.960.000	100%	
	Pengadaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	34.500.000	100%	
	Pemeliharaan	Tersedianya biaya	1 Tahun	47.860.000	100%	

	rutin/berkala kendaraan dinas operasional	pemeliharaan				
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD				
	Pengadaan pakaian dinas perlengkapan	Tersedianya pengadaan pakaian	1 tahun	38.000.000	100%	
04.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD				
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya sumber daya aparatur yang terlatih dan terampil	1 Tahun	101.979.000	100%	
05.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Penyusunan Renstra SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	1 Dok	4.085.000	100%	
06.	Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Perbatasan				
	Penyusunan Profil Perbatasan	Tersusunnya Penyusunan Profil Perbatasan	1 Dok	152.428.000	100%	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Kerja sama Antar Wilayah	1 tahun	67.629.000	100%	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan	Terselesaikannya Masalah Perbatasan	1 tahun	97.988.000	100%	
07.	Pengembangan Kawasan Perbatasan					
	Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya pengembangan kawasan perbatasan	1 Dok	193.158.000	100%	
	JUMLAH			1.842.835.000		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Kawasan perbatasan di Indonesia memiliki peranan yang strategis secara nasional, karena terkait dengan integritas dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, kawasan perbatasan memerlukan penanganan secara khusus sehinga mampu memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara serta hak-hak berdaulat. Penanganan kawasan perbatasan sebaiknya tidak dipandang sebagai “**halaman belakang dan pinggiran**”, melainkan halaman depan negara yang penangannya perlu mendapat perhatian secara khusus.

Isu strategis yang mendorong munculnya berbagai persoalan yang di perbatasan. isu tersebut, antara lain:

- a. dimensi pengelolaan batas wilayah;
- b. pengelolaan lintas batas;

- c. pembangunan kawasan perbatasan;
- d. dimensi kelembagaan;

Dimensi pengelolaan batas wilayah

Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah:

- a. belum selesainya proses penyelesaian dan penegasan batas negara;
- b. Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas;
- c. Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara;
- d. Pada aspek pertahanan keamanan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keadaman dan penegakan hukum di batas wilayah negara

Dimensi pengelolaan lintas negara

Isu strategis yang harus menjadi perhatian utama:

- a. **Aspek sarana dan prasarana** lintas batas negara adalah belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas batas CIQS (*Custom*: Bea Cukai, *Imigration*: Imigrasi, *Quarantine*: Karantina, dan *Security*: Keamanan: serta belum optimalnya aspek pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas.
- b. **Aspek ekonomi** lintas batas terdapat isu, yaitu belum optimalnya nilai tambah produksi di lokasi prioritas (lokpri) terhadap negara tetangga maupun PKSN; Belum efektifnya kerja sama perdagangan antar negara; adanya ketergantungan masyarakat di lokpri terhadap negara tetangga;Belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN Economic community pada tahun 2015.
- c. Isu strategis pada **aspek pertahanan dan keamanan**, di antaranya maraknya kegiatan ilegal di lokpri akibatlemahnya pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat
- d. Isu strategis di **bidang sosial budaya**: belum optimalnya pencatatan penduduk terkait fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di lokpri; serta adanya hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan.

Dimensi pembangunan kawasan perbatasan

Isu strategis pada aspek pembangunan kawasan perbatasan, yaitu:

- a. rendahnya **pelayanan inftrastruktur transportasi regional** (koneksi terhadap PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal di kawasan perbatasan.
- b. Isu strategis **penataan ruang** kawasan perbatasan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatn, dan pengendalian pemanfaatn ruang di kawasan perbatasan.

- c. Pada aspek **pertumbuhan ekonomi** kawasan perbatasan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah:
 - 1) belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDN di Lokasi Prioritas,
 - 2) peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di lokpri,
 - 3) lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomian kerakyatan
 - 4) lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif investasi) di kawasan perbatasan;
- d. pada aspek pelayanan sosial dasar kawasan, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama, di antaranya:
 - 1) minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai di lokpri.
 - 2) Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di lokpri
 - 3) Rendahnya SDM di lokpri akibat belum optimalnya upaya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM di lokpri akibat belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM
 - 4) Belum mantapnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan, serta
 - 5) Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan

Dimensi Kelembagaan

Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah:

- a. belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas program perbatasan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- b. Belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan dengan negara tetangga
- c. Terbatasnya sumber daya sarana, prasarana pendukung serta SDM lembaga pengelola perbatasan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kabupaten Kapuas Hulu

Nama SKPD : Badan Pengelola Badan Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPPD	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPPD	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			
	Penyediaan jasa surat menyurat	BPPD	Terlaksananya dukungan fasilitas guna aktifitas pelayanan yang baik	400 buah matrai	1.800.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BPPD	Terlaksananya dukungan fasilitas guna aktifitas pelayanan yang baik	400 buah matrai	1.800.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPPD	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	1 Tahun	37.200.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPPD	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	1 Tahun	37.200.000	
	Penyediaan rutin berkala dinas / operasional	BPPD	Terlaksananya regulasi administrasi perkantoran	1 Tahun	47.860.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPPD	Terlaksananya regulasi administrasi perkantoran	1 Tahun	47.860.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	61.080.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	61.080.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPPD	Terpenuhiya kebersihan kantor	1 Tahun	20.799.600	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPPD	Terpenuhiya kebersihan kantor	1 Tahun	20.799.600	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BPPD	Terpenuhiya kebutuhan Peralatan	1 Tahun	5.000.0000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BPPD	Terpenuhiya kebutuhan Peralatan	1 Tahun	5.000.0000	
	Penyediaan alat tulis kantor	BPPD	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	39.309.900	Penyediaan alat tulis kantor	BPPD	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	39.309.900	
	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	BPPD	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	10.700.000	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	BPPD	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	10.700.000	

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPPD	Terlaksananya efektifitas kinerja aparatur	1 Tahun	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPPD	Terlaksananya efektifitas kinerja aparatur	1 Tahun	3.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPPD	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan	1 Kegiatan	58.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dalam daerah	1 Kegiatan	58.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan	BPPD	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	3.000.000	Penyediaan bahan bacaan	BPPD	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	3.000.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	BPPD	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	1 Tahun	46.500.000	Penyediaan makanan dan minuman	BPPD	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	1 Tahun	46.500.000	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	282.092.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	282.092.000	
	Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	BPPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	1 Tahun	36.050.000	Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	BPPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	1 Tahun	36.050.000	
	Penyusunan RKA dan DPA DKPD	BPPD	Jumlah tersedia RKA,DPA,RKA perubahan dan DPA perubahan	1 Kegiatan	6.316.500	Penyusunan RKA dan DPA DKPD	BPPD	Jumlah tersedia RKA,DPA,RKA perubahan dan DPA perubahan	1 Kegiatan	6.316.500	
	Penyediaan jasa pendukung kantor	BPPD	Tersedianya jasa pendukung kantor	1 kegiatan	39.000.000	Penyediaan jasa pendukung kantor	BPPD	Tersedianya jasa pendukung kantor	1 kegiatan	39.000.000	
02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPPD	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatus	BPPD	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			
	Pengadaan kendaraan Dinas Operesional roda 4	BPPD	Tersedianya kendaraan dinas operesional roda 4	1 Unit	365.960.000	Pengadaan kendaraan Dinas Operesional roda 4	BPPD	Tersedianya kenderaa dinas operesional roda 4	1 Unit	365.960.000	
	Pengadaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	BPPD	Tersedianya Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	34.500.000	Pemeliharaan Gedung Kantor	BPPD	Tersedianya Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	34.500.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operesional	BPPD	Tersedianya biaya pemeliharaan	1 Tahun	47.860.400	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operesional	BPPD	Tersedianya biaya pemeliharaan	1 Tahun	47.860.400	
03.	Program peningkatan	BPPD	Terselenggaranya			Program peningkatan	BPPD	Terselenggaranya			

	disiplin aparatur		peningkatan disiplin aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			disiplin aparatur		peningkatan disiplin aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			
	Pengadaan pakaian dinas perlengkapan	BPPD	Tersedianya pengadaan pakaian	1 tahun	38.000.000	Pengadaan pakaian dinas perlengkapan	BPPD	Tersedianya pengadaan pakaian	1 tahun	38.000.000	
04.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BPPD	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			
	Pendidikan dan pelatihan formal	BPPD	Terwujudnya sumber daya aparatur yang terlatih dan terampil	1 Tahun	101.979.000	Pendidikan dan pelatihan formal	BPPD	Terwujudnya sumber daya aparatur yang terlatih dan terampil	1 Tahun	101.979.000	
05.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPPD									
	Penyusunan Renstra SKPD	BPPD	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	1 Dok	4.085.000	Dokumen Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah	BPPD	Terlaksananya penilaian prestasi kerja PNS	1 Dok	4.085.000	
06.	Pengelolaan Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Perbatasan			Program Pengelolaan Kawasan Perbatasan		Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Perbatasan			
	Penyusunan Profil Perbatasan	BPPD	Tersusunnya Penyusunan Profil Perbatasan	1 Dok	152.428.000	Profil Perbatasan	BPPD	Tersusunnya Penyusunan Profil Perbatasan	1 Dok	152.428.000	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya Kerja sama Antar Wilayah	1 tahun	67.629.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya Kerja sama Antar Wilayah	1 tahun	67.629.000	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan	BPPD	Terselesaikannya Masalah Perbatasan	1 tahun	97.988.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan	BPPD	Terselesaikannya Masalah Perbatasan	1 tahun	97.988.000	
07.	Pengembangan Kawasan Perbatasan	BPPD									
	Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya pengembangan kawasan perbatasan	1 Dokumen	193.158.000	Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya pengembangan kawasan perbatasan		193.158.000	
					1.842.835.000					1.842.835.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah selama tahun 2018 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai perwujudan dari pernyataan, ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu harus dibawa, dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, atau dengan kata lain **“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”**

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

- 1. MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH**

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas

- 2. MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial , Perlindungan perempuan dan anak . Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

- 3. MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi,

sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggirannya sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kapuas Hulu periode Tahun 2016-2021 tersebut diatas, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perbatasan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.

Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. penyusunan rencana dan kerjasama dalam pengelolaan perbatasan;
4. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
5. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
6. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan

Sementara itu hubungan langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati tersebut, BPPD KH langsung sebagaimana tabel di bawah ini.

**Keterkaitan Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu dengan Tugas dan Fungsi Badan
Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

VISI BUPATI	MISI BUPATI	KETERKAITAN BPPD DENGAN VISI DAN MISI BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih	BPPD Kapuas Hulu, khususnya pada aspek: 1. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
		2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan; 3. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama di kawasan perbatasan;
	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi perbatasan
	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RUTRW 2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan. 3. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, partisipatif dan efektif 4. Meningkatnya sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dan memiliki keterkaitan langsung dengan Renstra K/L BNPP, baik dalam tatanan kebijakan, strategis, Program maupun kegiatan.

Keterkaitan Visi dan Misi Badan Pengelola Perbatasan Nasional dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

VISI BPPN	MISI BNPP	KETERKAITAN BPPD KH DENGAN VISI DAN MISI BNPP
Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Negara yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan Negara sebagai Halaman Depan Negara yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya efektifitas dalam penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan	1. Meningkatnya efektifitas dalam penetapan kebijakan daerah dalam program pembangunan perbatasan
	2. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara	2. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara
	3. Meningkatkan efektifitas dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara	3. Meningkatkan efektifitas dalam fasilitasi dan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan perbatasan
	4. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara	4. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan Kawasan Perbatasan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yaitu kaitanya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya

faktor-faktor rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah hubungannya dengan RTRW dan KHLs, Badan Pengelola Perbatasan Daerah terkait secara langsung pada Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Program tersebut perlu mendapat perhatian baik secara langsung ataupun tidak langsung karena dapat menimbulkan pengaruh terhadap issue yang bernilai negative terhadap lingkungan.

3.4 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2018 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja 2020
1.	Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing	Meningkatnya Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan dalam Pengelolaan Perbatasan	Produk hukum daerah yang dihasilkan	1
		Meningkatnya efektivitas penetapan	Program/kegiatan yang dilaksanakan	4

		kebijakan dan program pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu		
		Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitas kerja sama	Jumlah koordinasi perencanaan dan Kerja sama	2
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah identifikasi potensi dan evaluasi/pengawasan	2

3.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 dapat dilihat pada **tabel berikut:**

Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kabupaten Kapuas Hulu

Nama SKPD : Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPPD	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPPD	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BPPD	Terlaksananya dukungan fasilitas guna aktifitas pelayanan yang baik	600 buah matrai	2.700.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BPPD	Terlaksananya dukungan fasilitas guna aktifitas pelayanan yang baik	600 buah matrai	2.700.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPPD	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	1 Tahun	43.200.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPPD	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	1 Tahun	32.400.000	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	74.880.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	74.880.000	
4	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	BPPD	Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	75.601.200	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPPD	Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	21.601.200	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BPPD	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan	1 Tahun	15.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BPPD	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan	1 Tahun	5.000.000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	BPPD	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	45.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	BPPD	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	45.000.000	
7	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	BPPD	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	20.000.000	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	BPPD	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	20.000.000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	BPPD	Terlaksananya efektifitas kinerja aparatur	1 Tahun	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	BPPD	Terlaksananya efektifitas kinerja aparatur	1 Tahun	3.000.000	

	bangunan kantor					bangunan kantor					
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPPD	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan	1 Kegiatan	131.600.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dalam daerah	1 Kegiatan	109.900.000	
10	Penyediaan bahan bacaan	BPPD	Tersedianya bahan bacaan	1 tahun	10.000.000	Penyediaan bahan bacaan	BPPD	Tersedianya bahan bacaan	1 tahun	-	
11	Penyediaan makanan dan minuman	BPPD	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	1 tahun	64.050.000	Penyediaan makanan dan minuman	BPPD	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	1 tahun	10.650.000	
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	300.026.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	300.026.000	
13	Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	BPPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	1 Tahun	93.580.000	Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	BPPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	1 Tahun	93.580.000	
14	Penyusunan RKA dan DPA DKPD	BPPD	Jumlah tersedia RKA,DPA,RKA perubahan dan DPA perubahan	1 Dokumen	6.316.500	Penyusunan RKA dan DPA DKPD	BPPD	Jumlah tersedia RKA,DPA,RKA perubahan dan DPA perubahan	1 Dokumen	3.716.500	
15	Penyediaan jasa pendukung kantor	BPPD	Tersedianya jasa pendukung kantor	48 Ob	97.800.000	Penyediaan jasa pendukung kantor	BPPD	Tersedianya jasa pendukung kantor	48 Ob	97.800.000	
02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPPD	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatus	BPPD	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			
1	Pengadaan kendaraan Dinas Operesional roda 2/speedboard	BPPD	Tersedianya kendaraan dinas operesional roda 4	4 Unit	107.500.000	Pengadaan kendaraan Dinas Operesional roda 2	BPPD	Tersedianya kenderaa dinas operesional roda 2 /speedboard	10 Unit	107.500.000	
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	BPPD	Tersedianya Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	34.500.000	Pemeliharaan Gedung Kantor		Tersedianya Biaya Pemeliharaan	1 Tahun	34.500.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operesional	BPPD	Tersedianya biaya pemeliharaan	1 Tahun	42.860.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operesional	BPPD	Tersedianya biaya pemeliharaan	1 Tahun	42.860.000	
03.	Program peningkatan disiplin	BPPD	Terselenggaranya peningkatan			Program peningkatan	BPPD	Terselenggaranya peningkatan disiplin			

	aparatur		disiplin aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			disiplin aparatur		aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	BPPD	Tersedianya pengadaan pakaian	1 tahun	50.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	BPPD	Tersedianya pengadaan pakaian	1 tahun	-	
04.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BPPD	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi SKPD			
1	Pendidikan dan pelatihan formal	BPPD	Terwujudnya sumber daya aparatur yang terlatih dan terampil	1 Tahun	100.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	BPPD	Terwujudnya sumber daya aparatur yang terlatih dan terampil	1 Tahun	-	
05.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPPD									
1	Penyusunan Renja SKPD	BPPD	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	1 Dokumen	4.085.000	Penyusunan Renja SKPD	BPPD	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	1 Dokumen	1.485.000	
06.	Pengelolaan Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Perbatasan			Pengelolaan Kawasan Perbatasan		Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Perbatasan			
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan	BPPD	Terwujudnya Kerja sama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan	1 tahun	100.000.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan	BPPD	Terwujudnya Kerja sama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan	1 tahun	-	
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	130.063.600	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	45.896.730	
3	Seminar Tentang Pengelolaan perbatasan	BPPD	Terlaksananya Seminar tentang Pengelolaan Perbatasan	1 Dokumen	79.250.000	Seminar Tentang Pengelolaan perbatasan	BPPD	Terlaksananya Seminar tentang Pengelolaan Perbatasan	1 Dokumen	-	

4	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	BPPD	Terlaksananya harmonisasi dalam perencanaan program dan kegiatan	1 tahun	93.570.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	BPPD	Terlaksananya harmonisasi dalam perencanaan program dan kegiatan	1 tahun	13.832.320	
07.	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	BPPD	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan			Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan		Terwujudnya koordinasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan			
1	Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya pengembangan kawasan perbatasan	1 Dokumen	107.660.800	Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya pengembangan kawasan perbatasan	1 Dokumen	35.495.600	
2	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	44.665.000	
3	Penyusunan Profil Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya Penyusunan Profil Perbatasan	1 Dokumen	175.000.000	Penyusunan Profil Kawasan Perbatasan	BPPD	Terlaksananya Penyusunan Profil Perbatasan	1 Dokumen	43.598.000	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (2016-2021), yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2020.

Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki. Penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik yang ada di internal, berupa kekuatan dan kelemahan, maupun aspek eksternal berupa ancaman dan hambatan. Secara substansial, Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program/ kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Renja Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Secara khusus, RKPD BPPD mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen Renstra BPPD 2016-2021 serta mampu mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2016-2021 yaitu: ”**MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BARDAYA SAING DAN HARMONIS**”.

Putussibau, Januari 2019

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,

AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670805 199403 1 015